

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan

1. Kebijakan

a. Arti Kebijakan

Kebijakan adalah terjemah dari kata “*Wisdom*” yaitu suatu kebijakan, kearifan seorang pemimpin terhadap masyarakatnya atau bawahannya. Kearifan seorang pemimpin sebagai pihak yang menentukan kebijakan.¹² Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *police*, yang berarti kebijakan. *Police* dalam bahasa inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah.

Menurut poerwadarminta, kebijakan berasal dari kata bijak, yang artinya kepandaian, kemahiran selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran yang selalu menggunakan akal yang sehat.¹³

Prof. Rusdiana menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian asas atau konsep yang menjadi garis dasar dan garis besar dalam pelaksanaan kepemimpinan, pelaksanaan pekerjaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam

¹² Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer.*, 97.

¹³ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 31

kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, serta suatu organisasi, dan sebagainya pencapaian cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.¹⁴

Anderson mengemukakan bahwa: “kebijakan adalah bagian dari segala perencanaan yang mempersiapkan segala keputusan yang baik yang berhubungan dengan tenaga maupun, waktu untuk mencapai keberhasilan dari sebuah tujuan tersebut”.

Syaiful sagala mengemukakan bahwa: “kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara baik”.¹⁵

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan (*wisdom*) adalah segala kemahiran, kepandaian, kebijaksanaan, kearifan, serta rangkaian, konsep, dan asas yang menjadi garis besar dalam rencana pelaksanaan suatu pekerjaan yang didasarkan atas suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda serta aturan yang ada.

Dari teori-teori diatas juga dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu kearifan, kebijaksanaan pemimpin yang menjadi garis besar atau garis utama dalam menentukan sebuah perencanaan atau pelaksanaan yang bersangkutan dengan pekerjaan, atau visi dan misi

¹⁴ Ibid., 32.

¹⁵ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer.*, 98.

dalam kepemimpinan, dan cara bertindak oleh atasan, demi tercapainya cita-cita dan tujuan dalam pencapaian sasaran.

b. Ciri-ciri Kebijakan

Ciri-ciri kebijakan menurut Menurut Ermaya E. Suradinata adalah:

- 1) Mengandung unsur hubungan yang bertujuan dengan adanya organisasi atau tujuan lembaga yang bersangkutan
- 2) Mengkomunikasikan serta menjelaskan kepada semua pihak yang bersangkutan
- 3) Menyatakan dengan bahasa yang mudah dipahami
- 4) Mengandung unsur ketentuan batas-batas waktu serta tindakan dikemudian hari.
- 5) Mengadakan pembiasaan jika diperlukan
- 6) Masuk akal serta dapat dilaksanakan, memberi peluang untuk bertindak, dan melakukan penafisran oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.¹⁶

Selain memiliki ciri-ciri diatas kebijakan juga mempunyai karakteristik. Menurut Ali Imron karakteristik kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki tujuan, kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi serta informasi pada pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan

¹⁶ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi.*, 34.

- 2) Memiliki konsep operasional, kebijakan sebagai panduan yang berifat luas serta umum yang harus mempunyai manfaat operasional dalam bidang pendidikan. Ciri kebijakan sebagai operasional sebagai berikut:
- a) Di buat oleh yang berwenang
 - b) Dapat di evaluasi
 - c) Memiliki sistematika.¹⁷
- 3) Dasar Kebijakan Pendidikan

Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis manusia selain sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk yang dapat didik dan proses pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat manusia yang bebas.¹⁸

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia N0. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

Tujuan kebijakan adalah untuk menentukan pilihan perumusan kebijakan dalam pendidikan, perlu pemahaman tentang pandangan terhadap tujuan kebijakan Pendidikan bahwa (1) system Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan (2) peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, dan global maka perlu di lakukan pembaharuan Pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.¹⁹

¹⁷ Ibid., 38.

¹⁸ Ibid., 140.

¹⁹ *Undang-undang Sisdiknas PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional*, Jakarta: Permata Press, 2013.

Dari teori yang terdapat didalam undang-undang sisdiknas No. 32 tahun 2013 tersebut, dapat di simpulkan bahwa perlunya melakukan kebijakan pembaruan tentang Pendidikan agar terencana searah dan berkesinambungan demi tercapainya suatu tujuan Pendidikan.

4) Model Proses Kebijakan

Proses kebijakan sebaiknya dipahami dari aspek perumusannya. Berkaitan dengan rumusan kebijakan, pal mengemukakan ada empat elemen yang saling berkitan:

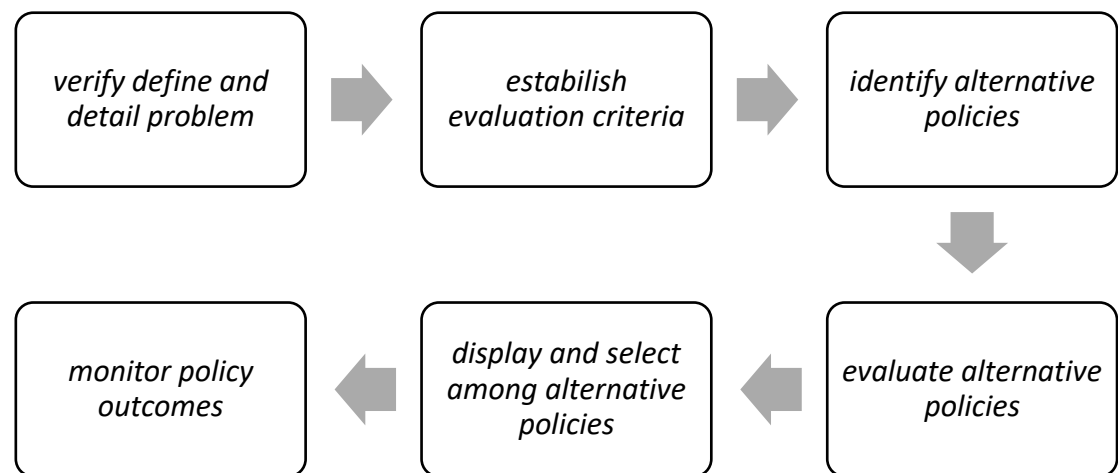
1. Faktor lingkungan yang mempengaruhi
2. Isi kebijakan itu sendiri termasuk di dalamnya maksud dan tujuan pendidikan
3. Perumusan masalah serta alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut
4. Dan akibat yang terjadi baik yang sesuai dengan lingkungan disekitarnya.

Prof. Rusdiana menyatakan bahwa dalam setiap kebijakan, baik itu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan maupun evaluasi kebijakan, maka aspek-aspek lingkunganlah harus memperoleh pertimbangan yang sangat matang agar tercapainya suatu kebijakan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, sehingga

tidak bertentangan dengan fungsi negara atau pemerintah itu sendiri.

Prof Rusdiana juga mengutarakan bahwa dalam studi kebijakan, perlu mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun usulan kebijakan, setelah diseleksi, maka kebijakan disahkan untuk kemudian di implementasikan. Kemudian diadakan evaluasi untuk menganalisis akibat dari kebijakan tersebut.²⁰

Patton dan Sawicki didalam buku kebijakan pembaruan pendidikan mengemukakan bahwa ada enam langkah dalam menentukan kebijakan.²¹



²⁰ Ibid., 72.

²¹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 35-36.

Dari teori Patton dan Sawicki diatas dapat di simpulkan bahwa 6 langkah dalam menentukan kebijakan yakni:

1. Memferivikasi masalah secara detail
2. Mengevaluasi kriteria masalah
3. Mengeidentifikasi kebijakan alternatif
4. Memantau pengambilan kebijakan
5. Menampilkan pilihan kebijakan alternatif
6. Mengevaluasi alternatif kebijakan

Prof. Rusdiana juga mengemukakan bahwa metode atau teknik analisis kebijakan didasarkan pada langkah-langkah berikut:

a. Merumuskan masalah kebijakan

Masalah kebijakan adalah suatu kebutuhan, dan nilai-nilai atau kesempatan yang tidak terealisasi, tetapi dapat dicapai melalui perumusan masalah yang mana terdiri dari pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi, dan pengenalan masalah.

b. Meramalkan kebijakan masa depan

Dalam membuat kebijakan juga harus mempunyai ramalan dan manfaat kebijakan di masa depan.

c. Merekomendasikan aksi-aksi kebijakan

Tahap rekomendasi adalah proses analisis kebijakan, yang akan menghasilkan keluaran yang bernilai dari setiap alternatif kebijakan.

d. Memantau hasil kebijakan

Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang sebab akibat dari kebijakan. Pemantauan menghasilkan kesimpulan yang jelas tentang cara pelaksanaan kebijakan dan hasil serta dampaknya.

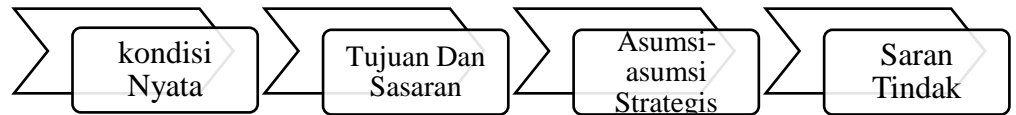
e. Mengevaluasi kinerja kebijakan

Evaluasi dimaksudkan untuk memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan serta memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kontak terhadap nilai-nilai yang mendasar tentang pemilihan tujuan dan target.²²

Dari teori diatas dapat di simpulkan bahwa dalam proses membuat kebijakan yang perlu di perhatikan adalah membuat perumusan masalah, meramalkan kebijakan masa depan, merekomendasikan aksi-aksi kebijakan, memantau hasil kebijakan serta mengevaluasi hasil kebijakan.

Jika ingin melakukan studi analisis terhadap implementasi pada suatu kebijakan, maka perlu menyangkut pada empat langkah yaitu :

²² Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi.*, 72-73.



(1) Bagaimana mendeskripsikan kondisi nyata *existing condition* tentang implementasi dari kebijakan itu, (2) dapat merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang diinginkan, (3) merumuskan asumsi-asumsi strategis yang mendasari alternatif tindakan, (4) saran tindak atau strategi perbaikan atau peningkatan kebijakan lebih lanjut.²³

5) Monitoring Evaluasi Dalam Kebijakan

Monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung. Monitoring yang dilakukan oleh seorang pemimpin mengandung fungsi pengendalian. Kegiatan monitoring mencakup penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (*output*), pelaporan tentang kemajuan, dan identifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. Monitoring ditujukan untuk mengetahui hasil informasi dalam usaha menjawab alasan kebijakan atau program pada suatu tahap dapat menghasilkan konsekuensi yang demikian. Monitoring berhubungan dengan

²³ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan.*, 56.

mendapatkan informasi secara faktual tentang suatu kebijakan, dengan bergerak maju atau mundur dari hal-hal yang diamati sekarang untuk menginterpretasikan yang telah terjadi sebelumnya.

Dunn mengemukakan bahwa monitoring berfungsi untuk:

1. Ketaatan (*compliance*), menentukan tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan
2. Pemeriksaan (*auditing*), memeriksa, menetapkan sumber dan layanan yang telah mencapai sasaran
3. Laporan (*accounting*), menghasilkan informasi yang akan membantu menghitung hasil serta perubahan-perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat dari implementasi kebijakan
4. Penjelasan (*explanation*), menjelaskan akibat kebijakan dan alasan antara perencanaan dan pelaksanaan yang tidak cocok.²⁴

Tahap akhir proses kebijakan adalah penilaian mengenai hal-hal yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan. Menghasilkan evaluasi yang akurat bukanlah pekerjaan yang sangat mudah, apalagi untuk mengubah kebijakan yang didalamnya ditemukan kesalahan-

²⁴ Ibid., 176.

kesalahan yang memerlukan perbaikan segera. Evaluasi implementasi akan mencapai hasil yang memuaskan apabila memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan.²⁵

B. Kepala Sekolah

1. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin, sedangkan sekolah adalah sebuah Lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut Wahjosumidjo, menjelaskan bahwa “kepala sekolah adalah seseorang tenaga fungsional guru yang di beri tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”.²⁶

Esensi kepala sekolah adalah “kepemimpinan pegajaran”. Seorang kepala sekolah adalah orang yang benar-benar seorang pemimpin dan sekaligus innovator. Seorang kepala sekolah selaku pemimpin di sebuah Lembaga Pendidikan yang bersifat kompleks memerlukan: a. Kemampuan memimpin, b. Kompetensi administrasi dan pengawasan, c. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi kepala sekolah, d. pemahaman terhadap peran sekolah yang bersifat multi fungsi, e. tugas pokok kepala sekolah dalam rangka pembinaan program

²⁵ Ibid., 178.

²⁶ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 83.

pengajaran, SDM, kesiswaan, dana, sarana prasarana, serta hubungan kerja sekolah dengan asyarakat.²⁷

Menurut Koontz dan O'donnel yang di kutip oleh eka prihatini, mendefinisikan “kepala sekolah adalah seseorang yang bisa mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya.²⁸

Seorang kepala sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan di pegangnya. Tidak sembarang orang patut menjadi kepala sekolah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping syarat yang berupa ijazah, persyaratan pengalaman kerja dan kepribadian harus di penuhi juga. Seorang kepala sekolah juga harus mempunyai ide dan inisiatif yang cemerlang demi kemajuan perkembangan sekolahnya.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an (QS. Shad ayat 26)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا

تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia yang adil dan*

²⁷ Sugeng Listyo, *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah Atau Madrasah* (Malang: UIN Malang press, 2008), 11

²⁸ Eka Prihatini, *Teori Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 100.

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (Qs. Shad ayat 26).²⁹

Dari penjelasan ayat di atas, dapat di simpulkan bahwasannya posisi kepala sekolahlah yang akan menentukan arah suatu Lembaga tersebut akan berjalan maju atau mundur kedepannya.

Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah di bandingkan dengan system manajemen Pendidikan yang di control dari pusat. Perhatian kepala sekolah meliputi keseluruhan lingkungan fisik sekolah baik kegiatan, dan segala jenis interaksi fungsionalnya.³⁰

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa semua system-sistem yang berkaitan dengan Lembaga di sekolah, kepala sekolah yang berhak menetapkan dan menjalankan segala program-programnya dan menetapkan keijakan-kebijakan dalam mewujudkan meningkatkan kualitas Lembaga yang di pimpinnya. Rutherford yang di kutip oleh Muhammad Abdullah menyatakan bahwa "Kepala sekolah yang efektif memiliki visi dan misi yang jelas dan mampu menerjemahkan menjadi sasaran sekolah yang berkembang menjadi harapan yang di hayati dan di setuju oleh guru dan peserta didik".³¹

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV J-ART, 2005), 455.

³⁰ Syaiful Sagala, *Administrasi Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 39.

³¹ Muhammad Abdullah, "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengelola Madrasah", *Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 1 (Januari 2011) 148.

Dari teori-teori diatas dapat di simpulkan kembali bahwa salah satu faktor pendukung dan kunci keberhasilan bagi sekolah yang berhasil adalah faktor dan peran kepala sekolah sebagai pemimpin Pendidikan.

2. Syarat-syarat Pemimpin Kepala Sekolah

Untuk memangku jabatan kepemimpinan dalam kepala sekolah yang dapat melaksanakan tugas-tugas dan memainkan peran-peran kepemimpinan yang sukses maka kepadanya dituntut memenuhi persyaratan-persyaratan status sosial ekonomi yang layak. Persyaratan dan sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin Kepala Sekolah. Goldhammer dan Becker dalam kepemimpinan kepala sekolah yang efektif memiliki ciri-ciri antara lain:

- 1) Memiliki kondisi yang sehat
- 2) Berpegetahuan yang sangat luas tentang kepemimpinan
- 3) Mempunyai keyakinan yang kuat bahwa suatu organisasi dapat berhasil dan mencapai tujuan yang ditentukan melalui usaha kepemimpinannya
- 4) Memiliki stamina atau daya kerja yang sangat besar dan kuat
- 5) Gemar serta cepat dalam pengambilan keputusan
- 6) Obyektif dalam mengontrol emosi serta lebih banyak mempergunakan rasio
- 7) Adil terhadap bawahan
- 8) Menguasai prinsip-prinsip kemanusiaan

- 9) Mampu menguasai teknik-teknik komunikasi
- 10) Mampu bertindak sebagai penasehat, guru dan terhadap bawahannya sesuai dengan situasi dan masalah yang dihadapi
- 11) Mempunyai gambaran yang luas tentang aspek kepemimpinan organisasi.
- 12) Menekankan tanggung jawabnya terhadap penyelesaian masalah-masalah yang di hadapi para peserta didiknya.³²

Di samping itu dibutuhkan persyaratan kualitas pribadi dan kemampuan seorang pemimpin Kepala Sekolah sebagai berikut: Berwibawa (terutama karena integritas pribadinya yang di jiwai oleh nilai luhur pancasila), jujur terpercaya, bijaksana, mengayomi, berani dan mampu mengatasi kesulitan, bersikap wajar, tegas, dan bertanggung jawab. Di samping itu Kepala Sekolah sebagai pemimpin, harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan jabatannya.

Al-Ramiah mengemukakan bahwa “kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inovasi Pendidikan. Keberhasilan dan kegagalan sekolah bergantung kepada kemampuan kepala sekolah dalam memimpin stafnya”.³³

Dari teori diatas dapat di simpulkan bahwa seorang kepala sekolah perlu mempunyai pengetahuan dan latihan yang mencukupi dalam melaksanakan peran mereka khususnya untuk mempengaruhi, memimpin, dan menggerakkan seluruh organisasi sekolah

³² Supardi, *Sekolah Efektif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 80.

³³ Ibid., 45.

berketerampilan dan mempunyai sikap terpuji. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memainkan perannya dengan efektif supaya sekolah yang di pimpinnya akan terus cemerlang.

3. Tugas Dan Fungsi Kepala Sekolah

Memahami fungsi dan tugas kepala sekolah, menuntut kita untuk memahami perkembangan tugas dan fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah dibandingkan dengan sistem manajemen pendidikan yang dikontrol dari pusat. Selain itu Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah harus menjadi “*learning person*” seseorang yang senantiasa berusaha menambah pengetahuan dan keterampilannya. Perhatian kepala sekolah meliputi keseluruhan lingkungan fisik sekolah, kegiatan, dan interaksi fungsionalnya mulai dari gedung sampai sudut-sudut halamannya, kantor, ruang belajar lapangan parkir, dan sebgainya. Seluruhnya diatur dengan disiplin yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.³⁴

Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh atas terlaksanakannya proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, tugas dan fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai pendidik (*educator*), manajer, administrator, dan supervisor.³⁵

³⁴ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer.*, 170-173.

³⁵ Andang, *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah.*, 56.

Berikut rincian tugas Kepala Sekolah:

No.	Tugas	Rincian Tugas	Uraian
1.	Manajerial	a. Merencanakan segala program- program sekolah b. Mengelola Standar Nasional Pendidikan c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi d. Melaksanakan kepemimpinan sekolah e. Mengelola sistem informasi manajemen sekolah	1. Melaksanakan pengelolaan standar kompetensi lulusan 2. Melaksanakan pengelolaan standar isi 3. Melaksanakan pengelolaan standar proses 4. Melaksanakan pngelolaan standar penilaian 5. Melaksanakan pengelolaan staandar pendidik dan tenaga kependidikan 6. Melaksanakan pengelolaan

			<p>standar sarana dan prasarana</p> <p>7. Melaksanakan pengelolaan standar pengelolaan</p> <p>8. Melaksanakan pengelolaan standar pembiayaan</p>
2.	Pengembangan Kewirausahaan	<p>a. Merencanakan program pengembangan kewirausahaan</p> <p>b. Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan</p> <p>c. Melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan</p>	<p>1. Program pengembangan jiwa kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses)</p> <p>2. Melaksanakan program pengembangan</p>

			jiwa kewirausahaan 3. Melaksanakan pengembangan program unit produksi 4. Melaksanakan program pemagangan
3.	Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan	a. Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan b. Melaksanakan supervisi guru c. Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan d. Menindak lanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru	

		<p>e. Melaksanakan evaluasi supervisi guru dan tenaga kependidikan</p> <p>f. Merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.³⁶</p>	
--	--	--	--

Dari tugas-tugas Kepala Sekolah diatas, maka tugas seorang pemimpin harus merealisasikan tujuannya dengan sebaik-baiknya dalam bekerja sama produktif dalam keadaan bagaimanapun yang dihadapi. Seorang pemimpin juga harus menjadi juru bicara kelompoknya serta memperlancar segala proses bentuk kegiatan di lembaga yang dipimpinnya

Dengan adanya teori-teori diatas maka mengkerucutkan bahwa kebijakan kepala sekolah yaitu suatu kebijakan, kearifan seorang pemimpin terhadap masyarakatnya atau bawahannya untuk menentukan mengurus segala sesuatu yang berupa kepentingan umum

³⁶ Hendarman dan Rohanim, *Kepala Sekolah Sebagai Manajer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 36-38.

atau masalah demi tercapainya atau terealisasinya sebuah tujuan pendidikan.

C. Pengertian Kualitas

1. Kualitas

Menurut istilah, kata kualitas berarti bermutu, yaitu tingkat baik buruknya sesuatu. Akan tetapi banyak pakar dan organisasi yang mencoba mendefinisikan kualitas (mutu) berdasarkan sudut pandangnya masing-masing seperti yang terurai di bawah ini:

- a) Menurut Joseph Juran, kualitas adalah kesesuaian penggunaan, ini berarti bahwa suatu produk atau jasa seharusnya sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna.
- b) Menurut ISO, kualitas adalah totalitas karakteristik suatu produk (barang dan jasa) yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang di spesifikasikan atau ditetapkan.³⁷

Kualitas bukanlah konsep yang mudah didefinisikan, apalagi untuk kualitas jasa yang dipersepsi secara beragam. Orang dapat mengatakan kualitas berdasarkan kriterianya sendiri seperti berikut:

- a) Melebihi dari yang dibayangkan dan diinginkan
- b) Kesesuaian antara keinginan dengan kenyataan pelayanan
- c) Sangat cocok dalam pemakaian
- d) Selalu dalam perbaikan dan penyempurnaan terus menerus

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 603.

- e) Mengembangkan dan membahagiakan pelanggan.³⁸

2. Strategi Peningkatan Kualitas

Mutu atau kualitas dapat diartikan seberapa jauh barang atau jasa dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan sesuai atau melampaui harapan-harapan pelanggan. Dalam mewujudkan mutu pendidikan terdapat komponen-komponen yang harus ada dalam upaya untuk mewujudkan mutu, beberapa komponen mutu tersebut adalah:

- 1) Kepemimpinan yang berorientasi pada mutu, dalam hal ini adalah manajer (Rektor, Kepala Sekolah) berperan sebagai penasihat, guru, dan pimpinan.
- 2) Pendidikan dan pelatihan (Diklat), adalah: merupakan keterampilan dan kemampuan pegawai atau staf Tata Usaha sekolah dan guru secara terus-menerus di-upgrade atau diperbaiki melalui pendidikan dan pelatihan diklat.
- 3) Struktur pendukung dalam hal ini adalah: Manajer puncak (Rektor, Kepala Sekolah) membutuhkan dukungan untuk suatu perubahan.
- 4) Komunikasi, yaitu proses interaksi yang berupa pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan harus jelas dan efektif.

³⁸ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan...*, 304.

- 5) Ganjaran dan pengakuan adalah: bewujudan dari *Team Work* yang berhasil menerapkan prinsip mutu harus diberikan ganjaran dan diakui oleh organisasi.
- 6) Pengukuran yaitu: penggunaan data hasil pengukuran (evaluasi) menjadi sangat penting dalam proses manajemen mutu.³⁹

Menurut Crosby, ada tiga belas langkah program mutu atau kualitas, yaitu:

- a. Membuat komitmen tentang mutu pendidikan apa saja yang perlu diperbaiki dan kemudian diumumkan kepada seluruh guru dan pegawai
- b. Berdasarkan komitmen tersebut di bentuk tim peningkatan mutu
- c. Melakukan pengukuran mutu melalui evaluasi dan pemantauan secara terus menerus
- d. Menentukan biaya perbaikan
- e. Membangun kesadaran bawahan tentang peningkatan pentingnya mutu pendidikan
- f. Mewujudkan perbaikan yang sesuai dengan rancangan
- g. Berusaha meminimalisir kesalahan
- h. Memberikan pengarahan-pengarahan khusus
- i. Komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan
- j. Menentukan tujuan yang jelas
- k. Mencari sebab-sebab terjadinya kesalahan

³⁹ Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan Dalam Multi Perspektif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 289-290.

- l. Mengakui prestasi bawahan dan memberikan reward
- m. Peningkatan kualitas di lakukan secara terus menerus.⁴⁰

Kualitas manajemen pendidikan tergambar dari setiap level proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pendidikan menjadi satu kesatuan utuh dan dilakukan sebaik mungkin secara terus menerus, dari awal sudah mulai dengan benar, menghindari kesalahan, dan cermat. Deming mengatakan bahwa untuk membangun kualitas harus selalu dilakukan perbaikan kualitas secara terus menerus (*continous quality improvement*).⁴¹

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang juga mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik (*good planing syistem*) dengan materi dan sistem tata kelola yang baik (*good govermance system*) dan disampaikan oleh guru yang baik (*good teachers*) dengan komponen pendidikan yang bermutu. Khususnya guru.⁴²

⁴⁰ Nurul Hidayah, *Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.*, 127.

⁴¹ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan.*, 306.

⁴² Dedy Mulyasa, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya saing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 120.

3. Konsep Dasar Kualitas

Menurut Josep Juran, ada 10 langkah untuk meningkatkan mutu atau kualitas, yaitu:

- 1) *Bild awareness of opportunities to improve* (membangun kepedulian untuk perbaikan dan peningkatan)
- 2) *Set goals for improvement* (menentukan tujuan-tujuan untuk peningkatan kualitas atau mutu)
- 3) *Organize to reach goals* (mengorganisasikan agar tercapainya tujuan)
- 4) *Provide training* (menyelenggarakan pelatihan)
- 5) *Carry out projects to solve problems* (mendorong pembangunan pemecahan masalah)
- 6) *Report progress* (melaporkan perkembangan)
- 7) *Give recognition* (memberikan pengakuan)
- 8) *Communicate result* (mengkomunikasikan hasil-hasil)
- 9) *Keep score* (menyimpan skor)
- 10) *Maintain momentum by making annual improvement part of the regular system and processes of the company* (menjaga momentum dengan membuat peningkatan tahunan sebagai bagian dari sistem dan proses regular perusahaan.⁴³

⁴³ Ibid., 293-294.

D. Pembelajaran Literasi

1. Pengertian Literasi

Literasi adalah sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis berbicara, dan menyimak. Sejalan dengan berjalannya waktu, definisi literasi telah bergeser dari pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bidang penting lainnya.⁴⁴

Kemampuan membaca adalah landasan bagi pertumbuhan intelektual. Pada masyarakat global, individu yang terpelajar menjadi sangat penting kedudukannya bagi pengembangan sosial dan ekonomi, tidak saja bagi dirinya sendiri tetapi juga keeluruhan bangsa dan negaranya. Semakin terpelajar suatu masyarakat, semakin dekat masyarakat itu menuju pada suatu masyarakat madani yang di cita-citakan adil, demokratis, beradab, dan bermutu taraf kehidupannya. Untuk meningkatkan mutu kehidupan itulah, negara berkewajiban untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia, sumber daya sosial, dan sumber daya material. Salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas membaca.⁴⁵

Penguasaan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan.

⁴⁴ Yunus Abidin, *Pembelajaran Literasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 1.

⁴⁵ Bahrul Hayat, *Mutu Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 56.

Penanaman literasi sedini mungkin harus disadari karena menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan berbudaya.

2. Arah Pembelajaran Literasi

Pembelajaran literasi disekolah dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan perkembangan definisi literasi, tujuan pembelajaran literasi pun mengalami perubahan. Pada awalnya pembelajaran literasi disekolah hanya ditujukan agar siswa terampil dan mampu menguasai dimensi Bahasa dan dimensi kognitif literasi yang mencakup (proses pemahaman, proses membaca, proses menulis, dan konsep analisis wacana tertulis).⁴⁶

Tujuan pembelajaran literasi secara internasional ditunjukkan agar siswa mampu mencapai kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

- a) Percaya diri, lancar dan paham dalam membaca dan menulis
- b) Tertarik pada buku-buku menikmati kegiatan membaca mengevaluasi, dan menilai bacaan yang dibaca
- c) Mengetahui dan memahami berbagai genre fiksi dan puisi
- d) Memahami dan mengakrabi struktur dasar narasi
- e) Memahami dan menggunakan berbagai teks nonfiksi
- f) Dapat menggunakan berbagai macam petunjuk baca
- g) Merencanakan, menyusun draf, merevisi, dan megedit tulisan secara mandiri
- h) Memiliki ketertarikan terhadap kata dan makna, serta secara aktif mengembangkan kosakata

⁴⁶ Ibid., 59

- i) Memahami system bunyi dan ejaan, serta menggunakannya untuk mengeja dan membaca secara akurat
- j) Lancar dan terbiasa menulis tulisan tangan.

Berdasarkan tujuan di atas secara sederhana pembelajaran literasi ditunjukkan untuk mengembangkan tiga kompetensi utama, yakni kompetensi tingkat kata, tingkat kalimat, dan tingkat teks.

Aspek- aspek di dalam literasi

1. Proses pemahaman (*Processes of comprehension*)
2. Tujuan membaca (*purposes for reading*) dan
3. Sikap membaca (*reading behaviors and attitudes*).⁴⁷

Memasuki tahun 2000an, pembelajaran literasi mengalami perluasan tujuan. Pada jenjang kelas rendah, pembelajaran literasi bertujuan memperkenalkan anak-anak tentang dasar-dasar membaca dan menulis, memelihara kesadaran Bahasa dan motivasi untuk belajar. Pembelajaran literasi pada jenjang sekolah menengah bertujuan membawa siswa melompat jauh ke depan. Dalam hal ini, siswa dilibatkan dengan berbagai teks dan teknologi yang akan membantu mengembangkan mereka sebagai komunikator aktif, kritis, bertanggung jawab dan kreatif untuk abad ke 21. Sebagai seorang pemelajar literasi, siswa terus diajak untuk mengeksplorasi berbagai teks dan cara-cara baru untuk memahami teks-teks tersebut. Sepanjang pembelajaran, siswa dituntut untuk selalu mengembangkan dan

⁴⁷ Yunus Abidin, *Pembelajaran Literasi*, 154.

menyempurnakan kemampuannya dalam menciptakan dan berbagai semua jenis teks, melalui pemanfaatan berbagai teknologi dan konteks secara baik.

Berdasarkan peran pemelajar literasi diatas, dapat dikemukakan bahwa siswa sebagai pemelajar literasi merupakan individu pembuat makna. Kemampuan membuat makna merujuk pada keterlibatan aktif siswa sebagai pembaca dan penulis dalam menafsirkan makna dari berbagai teks yang di baca, serta menyampaikan makna dengan berbagai cara melalui teks-teks yang dibuatnya. Kondisi ini tentu menuntut penerapan berbagai strategi dan keterampilan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan makna dan startegi. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperkaya pemahaman dan interprestasi siswa terhadap sebuah teks yang di baca atau ditulisnya.

Memasuki abad ke 21 pembelajaran literasi memiliki tujuan utama untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa dalam mengembangkan dirinya sebagai komunikator yang kompeten. Di abad ke 21 ini pembelajaran literasi memiliki tujun-tujuan sebagai berikut:

1. Membentuk siswa menjadi pembaca, penulis dan komunikator yang strategis
2. Meningkatkan kemampuan berfikir dan mengembangkan kebiasaan berfikir pada siswa
3. Meningkatkan dan memperdalam motivasi belajar siswa

4. Mengembangkan kemandirian siswa sebagai seorang pelajar yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter.⁴⁸

3. Pentingnya Literasi

Literasi tidak hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi bisa berarti melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Menurut Kirsch & Jungeblut dalam buku *Literacy: Profile of America's Young Adult* mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dapat menjadikan seseorang menjadi literat yang dibutuhkan bangsa agar Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan bahkan bersaing dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Pentingnya kesadaran berliterasi sangat mendukung keberhasilan seseorang dalam menangani berbagai persoalan.⁴⁹

Dari teori-teori diatas maka dapat di simpulkan bahwa melalui kemampuan literasi, seseorang tidak saja memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga bisa mendokumentasikan sepenggal pengalaman yang menjadi rujukan di masa yang akan datang. Literasi menjadi kecakapan hidup yang menjadikan manusia berfungsi maksimal dalam masyarakat. Kecakapan hidup bersumber dari kemampuan memecahkan masalah melalui kegiatan berpikir kritis.

⁴⁸ Ibid., 25.

⁴⁹ Putri Oviolanda, *Pentingnya Penguasaan Literasi Bagi generasi Muda Dalam Menghadapi MEA, The 1st Education and Language International* (Mei, 2017), 462.

Selain itu, literasi juga menjadi refleksi penguasaan dan apresiasi budaya. Masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang menanamkan nilai-nilai positif sebagai upaya aktualisasi dirinya. Aktualisasi diri terbentuk melalui interpretasi, yaitu kegiatan mencari dan membangun makna kehidupan. Hal tersebut dapat dicapai melalui penguasaan literasi yang baik.

E. Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Literasi

Di setiap organisasi, posisi dan peran pemimpin selalu sangat sentral. Maju dan mundurnya organisasi sangat tergantung pada kebijakan pimpinan yang mampu berimajinasi untuk memajukan organisasinya. Demikian pula dalam konteks sekolah sebagai organisasi, posisi kepala sekolah sangat penting dalam memajukan lembaga yang dipimpinnya. Bila mutu pendidikan disuatu sekolah hendak diperbaiki maka kuncinya ada pada kebijakana kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan kebijakan kepala sekolah di suatu lembaga mempunyai peranan yang sangat penting. Kepala sekolah sebagai individu yang bertanggung jawab di sekolah mempunyai kewajiban untuk berusaha agar semua potensi yang ada di lembaganya dapat di manfaatkan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu kebijakan kepala sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.

Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus mampu memobilisasi sumber daya sekolah, dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengembangan kurikulum, pembelajaran,

pengelolaan ketenagaan, sarana dan sumber belajar, keuangan, pelayanan siswa, hubungan kepala sekolah dengan masyarakat, dan penciptaan iklim sekolah.⁵⁰

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa kepala sekolah sebagai *leader* harus memiliki kemampuan yang baik tentang kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi. Adapun peranan kebijakan kepala sekolah sebagai administrator di sekolah meliputi: 1). edukator, 2). Manajer, 3). Administrator, 4). Supervisor, 5). Pemimpin, 6). Wirausahawan, 7). Penciptaan iklim kerja. Adapun ke tujuh peranan tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah Sebagai Edukator Pendidik

Kepala sekolah sebagai edukator (pendidik) yaitu dalam konteks proses pembelajaran, kepala sekolah menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan.

2. Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Kepala sekolah sebagai manajer yaitu kepala sekolah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Kepala sekolah memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik dilaksanakan

⁵⁰ E, Mulyasa, *Kurikulum Bberbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasinya* (Bandung Remaja Rosdakarya, 2003), 182.

di sekolah atau di luar sekolah. Serta membangun hubungan (*Relationship*) secara efektif dan baik.⁵¹

3. Kepala Sekolah Sebagai Administator

Kepala sekolah sebagai administator yaitu kepala sekolah harus mendayahgunakan dan memberdayakan sumber yang ada dan dapat diadakan secara efisien dan efektif untuk mencapai visi dan misi sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas arah dan kegiatan lembaga sekolah karena kepala sekolah berada di garda kedepan.

4. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu kepala sekolah secara berkala melakukan supervisi untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung terutama dalam pemilihan penggunaan metode, media yang di gunakan dan keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Matt Modcin yang di menungkapkan bahwa “fungsi penting yang harus diperankan dalam setiap tugasnya yaitu: Administratif function, Evaluation process, Teaching fuction dan Role of consultant”.⁵²

5. Kepala Sekolah Sebagai *Leader* (pemimpin)

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran. Peran pokok pimpinan sekolah terletak pada kesanggupannya memengaruhi lingkungan

⁵¹ Supardi, *Kepala Sekolah Efektif.*, 76.

⁵² Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2010), 55.

sekolah melalui penrapan proses kepemimpinan yang dinamis. Dengan demikian kepala sekolah, adalah seorang pemimpin pendidikan yang merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, mebgawasi, dan menyelesaikan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah dalam pencapaian tujuan penididikan.⁵³

6. Kepala Sekolah Sebagai Wirausahawan

Kepala sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk dalam hal-hal perubahan yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa dan kompetensi guru.⁵⁴

7. Kepala Sekolah Sebagai Pencipta Iklim Kerja

Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan
- b. Tujuan kegiatan perlu disusun denga jelas dan di informasikan kepada para guru sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja, para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut
- c. Para guru harus selalu diberitahu tentang dari setiap pekerjaannya

⁵³ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer.*, 87.

⁵⁴ Rohiat, *Manajemen Sekolah* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 33.

- d. Pemberian hadiah lebih baik dari pada hukuman, tetapi sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan
- e. Usaha untuk memenuhi kebutuhan sosio psiko fisik guru sehingga memperoleh kepuasan.⁵⁵

Dalam kepemimpinan kepala sekolah ialah yang paling berhak menetapkan seluruh roda kehidupan di lembaga yang di pimpinnya. Kepala sekolahlah yang paling berhak sebagai edukator atau penididik, sebagai manajer, sebagai asministator, sebagai supervisor, sebagai *leader* atau pemimpin, sebagai pencipta iklim kerja, sebagai wirausahawan serta pencipta kebijakan-kebijakan lain untuk tercapainya sebuah tujuan pendidikan.

Program literasi dianggap sangat penting dikarenakan sebagian besar proses sebuah pendidikan tergantung pada kemampuan dan kesadaran berliterasi. Dengan sarana literasi peserta didik akan mampu dalam memahami, mengetahui, serta menerapkan ilmu yang didapat dari bangku sekolah atau madrasah. Literasi sangat berkaitan dengan kehidupan peserta didik dalam menjalankan pendidikannya. Dengan membaca atau berliterasi dapat membawa impian masyarakat menuju masyarakat yang madani. Membaca diibaratkan seperti menanam biji kepintaran, yang dimana masa panen nanti akan kita petik hasilnya.

Program literasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya seseorang yang memimpin, seseorang yang di maksud disini adalah seorang

⁵⁵ Hendarman dan Rohanim, *Kepala Sekolah Sebagai Manajer.*, 49.

kepala sekolah. Selain campur tangan dari kepala sekolah juga ada campur tangan dari guru, karyawan dan peserta didik. Campur tangan kepala sekolah meliputi kebijakan mengenai program tersebut, yang mana untuk meningkatkan kualitas program tersebut kepala sekolah harus sering melakukan monitoring serta mengevaluasi program literasi tersebut agar berjalan seperti tujuan yang diharapkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Nurul Hidayah di dalam bukunya kepemimpinan visioner kepala sekolah mengungkapkan bahwa, Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan program-programnya, melaksanakan manajemen mutu, demi mencapai suatu tujuan dari kepemimpinannya tersebut.⁵⁶ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, didalam bukunya yang berjudul Kebijakan Pendidikan menyatakan bahwa, Di dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh *stakeholder* itu dapat tercapai.⁵⁷

⁵⁶ Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan* (Bina Aksara, 1984), 4.

⁵⁷ H.A.R Tilar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),20.